



**REVIU  
INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA DAN  
TAMBAHAN  
TAHUN 2022**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, PELAPORAN**

**PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

**Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan**

**Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan\_pn@yahoo.com**

**Website : [www.pn-painan.go.id](http://www.pn-painan.go.id)**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

# **PENGADILAN NEGERI PAINAN**



**PENGADILAN NEGERI PAINAN**



PENGADILAN NEGERI PAINAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

NOMOR : W3-U9/02/OT.01.2/XII/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan, akuntabel dan terukur, maka diperlukan untuk meninjau dan menetapkan kembali atau mereview untuk Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
6. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat mahkamah agung
7. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah agung
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang reuiu indikator kinerja utama pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama

Memperhatikan : SK Reuiu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/ KMA /SK/VI/2021 tentang penetapan indikator kinerja utama mahkamah agung republik indonesia tertanggal 16 juni 2021 yang diunggah tanggal 28 desember 2021 di situs mahkamah agung ri

Hasil Rapat Tim Reuiu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 desember 2021 tentang Pembahasan Reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Painan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN TENTANG PENETAPAN REUIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN


- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Painan , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Painan agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, hakim pengawas bidang bersama tim reviu diberikan tugas untuk :
- a. melakukan reviu atas pencapaian kinerja pengadilan negeri painan dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
  - b. melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri painan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
pada tanggal 31 desember 2021

---

Ketua Pengadilan Negeri Painan



  
MUHAMAD FAUZAN NARYADI, S.H., M.H.  
197802152001121002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PAINAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada</li> </ul>	Panitera dan panitera muda perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada</li> </ul>	Panitera dan panitera muda pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		
3.	<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____  Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	<p>Panitera dan panitera muda perdata</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	
4.	<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____  Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	<p>Panitera dan panitera muda pidana</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

5.	<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100%          Jumlah Perkara Diputus _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	<p>Panitera dan panitera muda pidana serta perdata</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6.	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi _____ 100%          Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<p>Panitera dan panitera muda pidana serta perdata</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
7.	<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali _____ 100%          Jumlah Perkara yang Telah Diputus _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	<p>Panitera dan panitera muda pidana serta perdata</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>100%</p>	panitera muda pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan _____</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	<p>100%</p>	panitera muda pidana, perdata, hukum, dan kepala sub bagian umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera muda perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung</li> </ul>	Panitera muda pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>100%</p>	Panitera muda perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>100%</p>	Panitera dan panitera muda pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>100%</p>	<p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar</p> <p>100%</p>	Panitera dan panitera muda pidana	Laporan Bulanan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya kepuasan masyarakat akan kinerja aparaturnya peradilan	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti x 100 Seluruh pengaduan yang masuk Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan x 100 Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan
2.	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengaduan	- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - Persentase Pengelolaan Belanja Modal	Realisasi Anggaran <i>Pagu Anggaran</i> x 100%	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PAINAN Tahun 2022**

No.	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggungjawab
1.	Pengendalian Gratifikasi	<p><i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan</p> <p>Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan</p>	<p>Menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Menyusun SOP, Memasang Poster Tentang Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN, Mensosialisasikan Gratifikasi via website</p> <p>Membuat Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi setiap sebulan sekali dan pelaporan juga disampaikan di website PN PAINAN, Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi</p>	<p>SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Laporan, Spanduk, Banner, Foto</p> <p>Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi baik berupa Hard Copy maupun melalui Website PN PAINAN</p>	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN

<p><b>2.</b></p> <p>Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>	<p>Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan Pengadlian Negeri PAINAN</p>	<p>Menyusun dokumen SPIP, Menetapkan Tim SPIP, menggunakan WA grup sebagai media pengendalian internal</p>	<p>SK Tim SPIP, Rapat Bulanan</p> <p>Undangan Sosialisasi, Daftar Hadir, Notulen, Foto-foto kegiatan</p>	<p>Ketua Pengadilan Negeri PAINAN</p>
<p><b>3.</b></p> <p>Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan</p>	<p>Menyusun pedoman Pengaduan Masyarakat yang telah dibuat dan dikordinasikan antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>Prosedur Pengaduan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI, SK Tim Pengaduan Masyarakat dari Ketua Pengadilan Negeri PAINAN</p>	<p>Ketua Pengadilan Negeri PAINAN</p>
	<p>Hasil Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti</p>	<p>Menyusun Laporan Tindak lanjut Pengaduan sebulan sekali</p>	<p>Laporan Pengaduan per bulan, Menampilkan laporan pengaduan via website</p>	<p>Ketua Pengadilan Negeri PAINAN</p>

		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan Monev atas penanganan pengaduan masyarakat	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
4.	Whistle Blowing System (WBS) sudah diinternalisasikan	Whistleblowing System	Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan Pengadilan Negeri PAINAN, Menetapkan SK Pengelola Whistleblowing System oleh Ketua Pengadilan Negeri PAINAN, Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistleblowing system	Dokumen/Keputusan WBS, SK pengelola WBS, Undangan, Daftar hadir, Notulen, Foto-foto Kegiatan, dan publikasi di Website	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
	Evaluasi penerapan	atas WBS	Menyusun program pengendalian pelaksanaan	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN

		sudah dilakukan	WBS, Menyusun program money atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS			Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Menyusun program money atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan		Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
5.	Peningkatan Pelayanan Publik	Kebijakan Pelayanan Publik telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Peningkatan Pelayanan Publik	Prosedur Pelayanan Publik, Foto Sarana Pelayanan Publik		Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
6.	Penetapan Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan Standar Pelayanan	Menyusun Standar Pelayanan, Menetapkan Tim SIPP	Sk Penetapan Standar Pelayanan, Inovasi, SOP Pelayanan Untuk Difabel		Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
		Standar Pelayanan telah di maklumkan	Menyusun Maklumat Pelayanan, Mensosialisasikan Maklumat Pelayanan via Website	Maklumat Standar Pelayanan, Inovasi, Maklumat tercantum di website		Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan		Ketua Pengadilan Negeri PAINAN



7.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja melalui arahan Ketua Pengadilan Negeri PAINAN pada Rapat, Apel	Daftar hadir, Notulen, Foto Kegiatan	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
8.	Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Diakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Hasil Survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Melakukan survei kepuasan masyarakat melalui IKM per semester Menayangkan hasil survei kepuasan masyarakat pada IKM di website Pengadilan Negeri PAINAN	Laporan IKM Screenshoot dari website	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN
		Diakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil IKM	Analisis IKM dan tindak lanjutnya	Ketua Pengadilan Negeri PAINAN

PAINAN, 03 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN**



**MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH. MH**

NIP. 19780215 200112 1 002



## **PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

Nomor: W3.U9/01/KP.04.04/XII/2021

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2021**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (menpan) nomor: per/9/m.pan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (iku) instansi pemerintah, maka pengadilan negeri painan perlu menetapkan indikator kinerja utama agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri painan
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa untuk meriviu Indikator Kinerja Utama perlu membentuk Tim Penyusun reviu Indikator Kinerja Utama;
  - d. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
  6. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat mahkamah agung
  7. peraturan presiden nomor 13 tahun 2005 tentang kepaniteraan mahkamah agung
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II TAHUN 2021;**
- Pertama : Indikator kinerja utama pengadilan negeri painan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan negeri painan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra) pengadilan negeri painan 2020-2024
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**



**MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH., MH**

***Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :***

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Padang di – Padang;
3. Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
4. Panitera Pengadilan Negeri Painan kelas II;
5. Sekretaris Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II  
 Nomor : W3.U9/ 01/KP.04.04/XII/2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 (IKU)

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5	6
1	<b>M. FAUZAN HARYADI, SH.,MH</b> NIP. 19780215 200112 1 002	Pembina (IV/a)	Ketua	Pembina	
2	<b>DR. RIYA NOVITA, SH., MH.</b> NIP. 19761107 200012 2 001	Pembina Tk. 1 (IV/b)	Wakil ketua	Pengarah	
3	<b>DESMINA SIMAMORA, SH.</b> NIP.19720120 199203 2 001	Penata TK 1 (III/d)	Sekretaris	Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan	
4	<b>DONI EKA PUTRA, SH., MH.</b> NIP. 19811217 200912 1 003	Penata (III/c)	Panitera	Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan	
5	<b>DIMAS MARESKA, SH</b> NIP. 19830310 200604 1 003	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	
6	<b>BAITUL ARSYAH M., SH., MH.</b> NIP. 19740402 199303 1 001	Penata Tk. 1 (III/d)	Panmud Perdata	Anggota	
7	<b>A. R. YULISMAN ERIKA, SH.</b> NIP. 19851202 201212 1 001	Penata (III/c)	Plt. Panmud Pidana	Anggota	
8	<b>ARMEITA YANDA, SE.</b> NIP.19780519 200912 2 002	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Painan  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II,**



**MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH., MH.**